BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, peneliti akan membahas hasil dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah dan fokus penelitian mengenai “*Glass Ceiling* dan Diskriminasi Gender di Korea Selatan: Tinjauan Terhadap Penerapan CEDAW”. Bab ini bertujuan untuk memberikan landasan teoritis dan empiris yang mendalam mengenai topik penelitian yang akan dibahas. Melalui tinjauan pustaka ini, yang diharapkan dapat memperkaya pemahaman dan memberikan perspektif yang lebih luas terkait dengan fokus penelitian ini.

Literatur **pertama** berjudul “**Fenomena *Glass Ceiling* Sebagai Wujud Budaya Patriarki di Korea Selatan**” ditulis oleh Baiq Nindy Anidia Agustina dan Agnes Monica Stephanie Saragi. Literatur ini membahas diskriminasi gender dalam dunia kerja di Korea Selatan, dengan dikaji melalui konsep *glass ceiling* dan pendekatan teori feminisme sosialis. Dalam literatur ini, *glass ceiling* dijelaskan sebagai hambatan yang tak kasat mata sehingga membatasi perempuan untuk mencapai posisi strategis dalam organisasi atau institusi, khususnya membahas di pemerintah Korea Selatan. Hambatan tersebut bukan hanya disebabkan oleh kurangnya kompetensi, melainkan muncul karena konstruksi sosial dan budaya patriarki yang menghadirkan diskriminasi pada perempuan (Agustina & Saragi, 2022).

Literatur ini menunjukkan dampak dari *glass ceiling* terhadap perempuan di Korea Selatan seperti kesulitan berkarier, penurunan produktivitas, gangguan psikologis, kehilangan kepercayaan diri, hingga mengalami stress berkepanjangan. Dalam literatur ini menyarankan perlunya reformasi budaya organisasi dan peningkatan edukasi tentang kesetaraan gender, serta mendorong perempuan untuk membangun jaringan kerja dan menunjukkan kompetensi sebagai bentuk perlawanan terhadap adanya bias secara struktural (Agustina & Saragi, 2022).

Dalam konteks penelitian *glass ceiling* di Korea Selatan, literatur ini menyoroti bagaimana warisan dan ajaran konfusianisme turut memperkuat budaya patriarki di Korea Selatan, yang dilihat secara historis dan sosial menempatkan perempuan dalam posisi subordinat baik dalam keluarga maupun masyarakat. Dalam konteks ketenagakerjaan, hal ini menyebabkan perempuan termarginalisasi, mengalami stereotip seks, beban kerja ganda, dan keterbatasan akses dalam mencapai posisi kepemimpinan. Penelitian ini menggunakan teori feminisme sosialis untuk menjelaskan bagaimana penindasan perempuan yang bersumber dari sistem kapitalisme dan struktur kelas, yang diperparah oleh adanya norma-norma patriarkal. Sehingga muncul stereotip bahwa perempuan dianggap tidak cocok dalam memimpin, dan kerap menempatkan perempuan lebih cocok di ranah domestik. Sehingga dalam kebijakan promosi dalam karier, perempuan diberatkan karena adanya tanggung jawab rumah tangga atau menjadi ibu (Agustina & Saragi, 2022).

Terdapat persamaan dan perbedaan pada literatur dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Persamaannya yakni, keduanya membahas ketidaksetaraan gender dalam ketenagakerjaan yang berdampak sistemik terhadap perempuan di Korea Selatan. Keduanya juga sama-sama menggunakan perspektif dari feminis sebagai kerangka teori dalam menjelaskan akar diskriminasi perempuan, serta menyoroti budaya dan perubahan sosial sebagai solusi. Literatur ini juga menyinggung keterkaitan dari marginalisasi dan norma budaya yang menjadi aspek penting dalam penelitian ini.

Kemudian, terdapat juga perbedaan antara literatur dan penelitian yang mana fokus dari literatur ini hanya menitik beratkan pada warisan konfusianisme dan budaya maskulin dalam pemerintahan Korea Selatan. Sementara itu, penelitian ini menyoroti implementasi dari prinsip dan norma internasional yaitu CEDAW sebagai kebijakan kesetaraan gender yang diratifikasi Korea Selatan. Literatur ini bersifat analitis dan naratif berdasarkan studi pustaka, sedangkan pada penelitian ini lebih berorientasi pada evaluasi

dari kerangka hukum internasional yaitu CEDAW untuk disesuaikan dengan kondisi struktural dan budaya Korea Selatan yang ada.

Literatur kedua berjudul **“Gender Inequality in the Labor Market in South Korea”** yang ditulis oleh A. Sabitkyzy dan diterbitkan oleh Al-Farabi Kazakh National University dalam jurnal *Oriental Studies Series* edisi tahun 2023. Literatur ini mengkaji kesenjangan gender dipasar tenaga kerja Korea Selatan dengan menggunakan pendekatan *mixed methods* yang menggabungkan studi literatur, survei, dan wawancara mendalam. Penelitian ini menemukan bahwa perempuan di Korea Selatan mengalami diskriminasi dalam berbagai bentuk, termasuk keterwakilan yang rendah diposisi tinggi, terbatasnya akses pada pelatihan dan pengembangan, serta kesenjangan upah berdasarkan gender. Hal ini mengidentifikasi adanya stereotip gender dan bias pada di tempat kerja sebagai faktor utama yang memperparah ketimpangan ini (Sabitkyzy, 2023).

Faktor-faktor historis ikut mempengaruhi seperti budaya konfusianisme dan struktur patriarkal dijelaskan turut membentuk norma sosial yang dapat membatasi partisipasi perempuan di ranah pekerjaan. Meskipun Korea Selatan telah menerapkan seperti *Equal Employment Opportunity Law*, kuota gender di sektor publik dan swasta, serta dukungan untuk mengambil cuti orang tua dan layanan penitipan anak, pelaksanaan kebijakan tersebut masih belum optimal. Dari hal itu, masih ditemukan kesenjangan nyata dalam promosi karier dan representasi perempuan di posisi kepemimpinan. Bahkan dijelaskan juga, bahwa pemerintah berencana membubarkan Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga (MOGEF) pada tahun 2022, yang memunculkan adanya kekhawatiran akan kemunduran dalam perlindungan hak-hak terhadap perempuan di Korea Selatan khususnya pada sektor ketenagakerajaan (Sabitkyzy, 2023).

Literatur ini menyoroti konsekuensi sosial dan diskriminasi di tempat kerja, seperti meningkatnya jumlah perempuan yang keluar dari pasar kerja, rendahnya tingkat kepuasan kerja, dan meningkatnya keputusan perempuan

muda untuk menunda atau menolak pernikahan dan kehamilan. Kondisi ini tidak hanya merugikan perempuan secara individual, tetapi juga berdampak terhadap perkembangan ekonomi nasional dan struktur demografi negara, termasuk turunnya angka kelahiran secara drastis (Sabitkyzy, 2023).

Persamaan pada literatur ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu, sama-sama mengangkat permasalahan ketimpangan gender dalam dunia kerja di Korea Selatan. Keduanya mengangkat isu budaya patriarki dan nilai tradisional sebagai akar struktural diskriminasi gender dalam rekrutmen, promosi, dan kesenjangan dalam akses terhadap pengembangan karier merupakan sebagian faktor yang menunjukkan dalam melanggengkan fenomena *glass ceiling*. Selain itu, baik literatur maupun penelitian, keduanya sama-sama menekankan bahwa akar permasalahan terletak pada warisan budaya patriarki dan nilai tradisional seperti ajaran konfusianisme yang telah terinternalisasi dalam sistem sosial maupun kebijakan ketenagakerjaan di Korea Selatan. Keduanya menyepakati bahwa pentingnya intervensi dari negara dan aktor-aktor terkait, merupakan upaya menuju kesetaraan gender di dunia kerja secara menyeluruh.

Kemudian, perbedaan literatur dengan penelitian terdapat pada kondisi aktual dan kebijakan pemerintah domestik dalam mengatasi kesenjangan gender lebih ditekankan pada literatur ini, namun tidak secara eksplisit dalam mengkaji implementasi CEDAW sebagai instrumen hukum internasional. Sementara penelitian memfokuskan pada efektivitas dalam penerapan CEDAW dalam kebijakan nasional di Korea Selatan. Oleh itu, literatur ini dapat memperkaya dan sekaligus menambahkan konteks empiris dari kebijakan lokal yang mendasari analisis kerangka hukum internasional dalam penelitian peneliti.

Literatur **ketiga** yang berjudul “*Gender Inequality of Job Security: Veiling Glass Ceiling in Korea*” ditulis oleh Hanna Jung dan Joonmo Cho. Literatur ini membahas fenomena *glass ceiling* di Korea Selatan dengan pendekatan empiris yang inovatif yaitu dengan menggabungkan indikator

seperti keamanan kerja (*job security*) dan upah dalam mengukur diskriminasi berbasis gender di dunia kerja. Berbeda dari literatur sebelumnya yang hanya menyoroti kesenjangan upah, dalam literatur ini menemukan bahwa ketimpangan gender di Korea Selatan lebih tersembunyi dan kompleks, terlihat dalam ketidakamanan kerja perempuan yang bahkan dikalangan pekerja tetap dan posisi karier menengah ke atas (Jung & Cho, 2020).

Literatur ini menggunakan data panel nasional dari Korea *Labor and Income Panel Studies* (KLIPS) tahun 2003-2009 serta metode statistik kuantitatif seperti *counterfactual decomposition* dan analisis kuantil. Sehingga hasilnya menunjukkan bahwa perempuan menghadapi hambatan yang lebih besar dalam mempertahankan pekerjaan, terutama setelah menikah, melahirkan, hingga fase merawat anak, meskipun mereka menempati posisi formal yang tergolong “baik”. Literatur ini juga membuktikan bahwa kesenjangan tidak hanya muncul di tingkat bawah, tetapi semakin jelas di kuantil menengah keatas, ketika upah dan stabilitas kerja digabungkan dalam satu indeks, yaitu *Weighted Working Conditions Index* (WWCI). Kondisi ini menunjukkan bahwa perempuan menghadapi diskriminasi struktural yang lebih tersembunyi dalam sistem kerja yang tampak netral (Jung & Cho, 2020).

Selain itu, literatur ini menyoroti bahwa struktur pasar kerja ganda di Korea Selatan diantara pekerja reguler dan tidak tetap, serta beban reproduksi sosial yang masih dilimpahkan kepada perempuan menjadi penyebab utama mengapa perempuan sulit mempertahankan posisi dan karier mereka. bahkan dalam kelompok pekerja tetap di perusahaan besar, perempuan menunjukkan tingkat retensi kerja yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Sehingga dalam literatur ini dapat disimpulkan bahwa, kebijakan ketenagakerjaan yang hanya berfokus pada upah tanpa memperhitungkan keamanan kerja yang akan mempengaruhi kegagalan mengidentifikasi dan mengatasi *glass ceiling* yang sebenarnya (Jung & Cho, 2020).

Literatur ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Keduanya menyoroti fenomena *glass ceiling* dan ketimpangan

gender yang terus mengakar dalam struktur sosial dan ekonomi di Korea Selatan. Begitu juga dalam literatur ini menunjukkan bahwa ketimpangan gender tidak hanya terlihat dalam angka statistik, tetapi juga dalam pengalaman kerja sehari-hari yang dilakukan perempuan, terutama dalam hal partisipasi berkelanjutan dan promosi jabatan. Keduanya menyarankan adanya reformasi kebijakan struktural dan perubahan budaya kerja, agar perempuan dapat berpartisipasi secara setara dalam dunia kerja dan kehidupan publik.

Terdapat perbedaan dari literatur dan penelitian yang akan diteliti seperti fokus pada pendekatan empiris berbasis data panel untuk membuktikan keberadaan *glass ceiling* melalui indikator kuantitatif seperti WWCI. Namun tidak secara langsung mengkaji penerapan atau efektivitas instrumen hukum internasional CEDAW, yang mana pada penelitian menitikberatkan pada bagaimana CEDAW sebagai instrumen internasional diimplementasikan dalam kebijakan nasional Korea Selatan untuk menghapus diskriminasi gender.

Literatur keempat berjudul “**Upaya Korea Women’s Association United Dalam Memperjuangkan Kesetaraan Gender di Ranah Politik Korea Selatan**” yang ditulis oleh Oktavia Widya Kumalasari dan Hamdan Nafiatur Rosyida. Dalam literatur ini membahas secara komprehensif peran dan strategi yang dijalankan oleh Korea Women’s Association United (KWAU) sebagai salah satu organisasi perempuan yang berpengaruh di Korea Selatan dalam memperjuangkan kesetaraan gender, khususnya di bidang politik. Literatur ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan studi pustaka dengan melakukan penulisan yang menganalisis bagaimana KWAU memobilisasi masyarakat, melakukan advokasi kebijakan, serta mengawal jalannya demokratisasi agar lebih inklusif terhadap perempuan. Dalam literatur ini pun menjelaskan bahwa meskipun Korea Selatan sudah menjadi negara yang membuktikan kemajuan dalam bidang ekonomi dan pembangunan manusia yang tinggi, namun kesetaraan gender di negara ini masih tertinggal, terutama di bidang politik. Rendahnya representasi perempuan di parlemen dan minimnya keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan

menandakan bahwa sistem politik Korea Selatan masih didominasi oleh nilai-nilai patriarki dan ajaran konfusianisme. Bahkan, dalam data yang dikeluarkan UN Women (2020) dan *World Economic Forum* (WEF) menjelaskan bahwa Korea Selatan sempat berada di posisi ke-107 dari 156 negara mengenai representasi perempuan di parlemen yang masih jauh dari di bawah rata-rata global (Kumalasari & Nafiatur, 2022).

Menanggapi kondisi tersebut, KWAU disini disebutkan menjelaskan berbagai peran strategis sebagai *representative, advocate, watchdog, provider of standards, hingga citizenship champion*. Di bawah peran-peran ini, KWAU aktif melakukan lobi politik, menghadiri parlemen, menyusun dan mendorong pengesahan undang-undang anti-diskriminasi, hingga mengorganisasi petisi, kampanye publik, dan aksi massa untuk menekan institusi negara dan partai politik supaya lebih responsif terhadap isu kesetaraan gender. KWAU juga ikut aktif dalam mengawasi partai-partai politik yang tidak patuh terhadap sistem kuota 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan mengevaluasi komitmen gender dalam setiap proses pemilu nasional (Kumalasari & Nafiatur, 2022).

Literatur ini menekankan bahwa KWAU tidak hanya berfokus pada aspek institusional, tetapi membangun adanya basis kekuatan *civil society* dengan mengadakan forum perempuan, festival budaya bertema politik, dan kampanye hari perempuan internasional sebagai media untuk membangun solidaritas dan kesadaran gender. Dengan demikian, KWAU berperan penting dalam menjembatani aspirasi masyarakat dengan proses kebijakan negara serta memperkuat partisipasi perempuan dalam sistem demokrasi Korea Selatan.

Literatur ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam fokus pada upaya untuk mengatasi diskriminasi gender yang melembaga dalam struktur sosial dan politik Korea Selatan. Pada penelitian peneliti mengkaji hambatan yang dihadapi perempuan dalam mencapai posisi kepemimpinan melalui fenomena *glass ceiling*, maka literatur ini memberikan gambaran konkret bagaimana organisasi masyarakat sipil seperti KWAU

memperjuangkan kesetaraan gender dan meeubah hambatan tersebut khususnya dalam ranah politik dan parlemen. Lalu, literatur ini maupun penelitian dari peneliti sama-sama menyoroti pengaruh dari budaya patriarki dan ajaran konfusianisme sebagai akar historis dan budaya dari ketimpangan gender di Korea Selatan. Kemudian keduanya sama-sama mendukung ide bahwa transformasi kesetaraan gender tidak hanya bisa dicapai melalui hukum formal, melainkan juga membutuhkan tekanan dari aktor-aktor non-negara yang aktif, termasuk masyarakat sipil seperti KWAU. Sejalan hal itu, perspektif dari prinsip CEDAW, yang mengakui pentingnya peran berbagai aktor dalam penghapusan diskriminasi terhadap perempuan yang tertulis khususnya pada Pasal 7 dan Pasal 8 tentang partisipasi politik.

Literatur ini memiliki perbedaan dengan penelitian oleh peneliti yang dapat ditemukan dalam peran aktor lokal yang difokuskan KWAU dalam memperjuangkan kesetaraan gender di tataran praktik sosial dan politik, tanpa membahas secara eksplisit tentang instrumen hukum internasional seperti CEDAW. Sementara itu, penelitian ini secara khusus mengkaji implementasi CEDAW sebagai kerangka hukum internasional, termasuk bagaimana Korea Selatan mengadopsi prinsip-prinsip CEDAW ke dalam kebijakan domestik. Literatur ini dalam kata lain, menjadi pelengkap yang dapat memberikan gambaran empiris dan praktik nyata tentang bagaimana aktor lokal mengambil peran dalam mengisi celah antara prinsip normatif hukum internasional dan realitas penerapan di dalam negeri.

Literatur **kelima** yang berjudul “*Glass Ceiling pada Pekerja Perempuan: Studi Literatur*” ditulis oleh Ade Nuri Septiana dan Rina Herlina. Literatur ini merupakan hasil studi literatur terhadap sepuluh jurnal internasional yang terbit antara tahun 2019 hingga 2022, dengan fokus pada fenomena *glass ceiling* yang dialami oleh perempuan dalam dunia kerja. Literatur ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor penyebab terjadinya *glass ceiling*, strategi yang dapat dilakukan untuk menghadapinya,

serta tantangan yang dihadapi oleh perempuan setelah berhasil melewati hambatan tersebut (Septiana & Haryanti, 2023).

Penelitian ini menggunakan metode *traditional literature review*, yaitu pendekatan sistesis literatur non-sistematis yang memungkinkan eksplorasi ide secara mendalam dan fleksibel. Dari hasil tinjauan, ditemukan bahwa fenomena *glass ceiling* merupakan penghalang tak kasat mata yang dapat menghambat perempuan untuk mencapai posisi strategis dalam organisasi, meskipun memiliki kompetensi dan kualifikasi yang setara atau bahkan diatas dari laki-laki. Literatur ini menjelaskan bahwa hambatan tersebut tidak bersifat individual, melainkan sistematis karena perempuan dibatasi bukan karena kurangnya kemampuan, tetapi mereka adalah perempuan. Faktor penyebabnya *glass ceiling* tersebut dikelompokkan menjadi tiga kategori besar yaitu, pertama faktor dari dalam diri perempuan itu sendiri, seperti rendahnya ambisi dan kurangnya kepercayaan diri, lalu minimnya pengalaman dan pendidikan, serta keterbatasan waktu akibat peran domestik. Kedua, faktor dari tempat kerja, seperti adanya budaya kerja yang cenderung maskulin, stereotip negatif mengenai kepemimpinan perempuan, jaringan kerja eksklusif seperti *old boys network*, diskriminasi kebijakan, hingga sindrom *queen bee* dimana atasan perempuan justru menghambat perempuan lain. Faktor ketiga adanya preferensi yang berkaitan dengan konflik peran ganda antara pekerjaan dan keluarga, kurangnya dukungan domestik, serta kesulitan mencapai *work life balance* (Septiana & Haryanti, 2023).

Literatur ini juga membahas strategi untuk mengatasi *glass ceiling* seperti melibatkan tiga tingkat intervensi yaitu, individu, institusi, dan negara. Pada tingkat individu, perempuan perlu meningkatkan kompetensi, memperluas jaringan, dan membangun kepercayaan diri. Pada tingkatan institusional, organisasi perlu menghapuskan praktik diskriminatif dan bias gender, menerapkan rekrutmen dan promosi secara adil, serta menyediakan mentoring dan pelatihan kepemimpinan. Pada tingkat negara, dibutuhkan kebijakan afirmatif dan perlindungan hukum yang dapat menjamin partisipasi

setara perempuan dalam lingkup pekerjaan dan pengambilan keputusan. Menariknya, literatur ini mengangkat isu pasca *glass ceiling* dari berbagai tantangan baru yang muncul setelah perempuan berhasil menduduki posisi kepemimpinan. Di mana tantangan ini mencakup prasangka dan stereotip yang masih melekat, kesepian sosial di tempat kerja yang mayoritas maskulin, ekspektasi berlebihan dari masyarakat, tekanan psikologis, serta tetapnya beban peran ganda sebagai ibu dan istri kepada perempuan. Oleh itu, keberhasilan dalam menembus *glass ceiling* tidak hanya menandakan berakhirnya diskriminasi, melainkan membuka babak baru dalam perjuangan perempuan di dunia kerja (Septiana & Haryanti, 2023).

Persamaan mengenai literatur dan penelitian oleh peneliti yang dilihat dari fokus pada fenomena *glass ceiling* dan bagaimana diskriminasi gender menjadi terwujud dalam dunia kerja, dan bukan hanya dalam bentuk upah yang timpang tetapi juga hambatan struktural dan simbolik. Keduanya juga melihat bahwa penyebab dari fenomena ini bersifat sistematis yang berasal dari kombinasi faktor budaya, institusional, dan sosial selain itu, literatur ini sejalan dengan penelitian yang mana memandang bahwa strategi mengatasi *glass ceiling* memerlukan kerja lintas level yang dimulai dari individu hingga negara, dan tidak cukup hanya melalui reformasi kebijakan tanpa perubahan budaya organisasi dan masyarakat.

Terdapat perbedaan yang signifikan antara literatur ini dengan penelitian, di mana literatur hanya bersifat global dan tidak spesifik menjadi konteks negara Korea Selatan, sementara penelitian ini secara khusus berfokus pada situasi perempuan di Korea Selatan, khususnya dalam kaitan dengan implementasi CEDAW. Literatur ini juga tidak mengulas instrumen hukum internasional seperti CEDAW secara eksplisit, melainkan lebih bersifat konseptual dan sintesis tematik dari berbagai studi lintas negara. Sementara, penelitian ini menempatkan CEDAW sebagai kerangka analisis yang mampu mengevaluasi efektivitas kebijakan kesetaraan gender di tingkat nasional. Kemudian, literatur ini lebih tepat digunakan sebagai penguat kerangka teoritis

dan konseptual, serta pembandingan kondisi yang menegaskan bahwa fenomena *glass ceiling* bersifat universal dan sistemik hingga terjadi di negara-negara maju.

Literatur keenam dengan judul “*Gender Equality and Legislative Evaluation of Gender-Based Laws in Korea*” yang ditulis oleh Kyungho Choi. Literatur ini membahas secara komprehensif bagaimana kesetaraan gender di Korea Selatan diupayakan melalui pendekatan hukum dan kebijakan publik, dengan fokus pada evaluasi legislasi berbasis gender, penerapan *Gender Impact Assessment (GIA)*, serta peran Mahkamah Konstitusi Korea dalam menilai konstitusionalitas undang-undang yang berpengaruh pada perempuan. Literatur ini juga menyajikan pendekatan hukum dan kebijakan yang konkret, selaras langsung dengan implementasi prinsip-prinsip dalam CEDAW (Choi, 2021).

Pada bagian pembukaan, literatur ini menjelaskan bahwa Konstitusi Korea Selatan, khususnya Pasal 11 ayat 1, menjamin ketertaraan di hadapan hukum tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Namun, Choi menggarisbawahi bahwa perlindungan konstitusional saja dianggap tidak cukup, karena pelaksanaannya memerlukan instrumen hukum dan kebijakan yang operasional. Lalu di sinilah menunjukkan, dari pentingnya GIA sebagai alat untuk mengevaluasi apakah suatu kebijakan atau undang-undang memberikan dampak yang tidak adil terhadap laki-laki atau perempuan. Ditekankan juga bahwa GIA adalah bagian dari strategi besar gender mainstreaming, yang ditetapkan oleh pemerintah Korea Selatan sejak pertengahan 2000-an dan terus memperkuat melalui pedoman teknis, peraturan, serta pelatihan bagi aparatur negara (Choi, 2021).

Literatur ini meninjau beberapa kebijakan utama dalam mendukung kesetaraan gender, seperti *Equal Employment Opportunity and Work-Family Balance Assistance Act* dan *Act on Support for Female-Owned Business*. Literatur ini, secara kritis menilai bahwa meskipun undang-undang ini mencantumkan prinsip non-diskriminasi, nyatanya dalam pelaksanaan di

lapangan masih menemukan banyak hambatan-hambatan. Salah satu contohnya seperti rendahnya efektivitas pasal tentang promosi jabatan yang melarang diskriminasi berdasarkan gender, yang seringkali sulit dibuktikan karena sangat bergantung pada diskresi pemberi kerja. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hukum formal telah disesuaikan dengan prinsip CEDAW, dalam praktiknya masih terdapat banyak “ruang abu-abu” yang tidak tersentuh oleh regulasi (Choi, 2021).

Literatur ini juga menyoroti pentingnya keterlibatan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penguji konstitusionalitas undang-undang yang memiliki peran besar dalam menciptakan budaya hukum yang inklusif dan responsif terhadap isu kesetaraan gender. Contoh kasus-kasus yang dibahas dalam literatur ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat mengoreksi kebijakan yang secara tidak langsung mendiskriminasi perempuan. Selain itu, penulis pada literatur ini menekankan juga perlunya diversifikasi gender dalam lembaga peradilan, termasuk jumlah hakim perempuan, untuk memastikan bahwa perspektif gender benar-benar mewarnai putusan-putusan penting (Choi, 2021).

Terdapat persamaan pada literatur ini dengan penelitian yang terletak pada isu yang dibahas mengenai diskriminasi gender dalam sistem sosila dan hukum di Korea Selatan, serta menganalisis upaya konkret yang dilakukan negara untuk memenuhi prinsip-prinsip CEDAW. Jika pada penelitian berfokus pada fenomena *glass ceiling* sebagai bentuk diskriminasi struktural dalam akses terhadap kekuasaan dan jabatan publik, maka literatur ini memberikan kerangka hukum dan kebijakan yang menjelaskan bagaimana pemerintah Korea Selatan mengupayakan perubahan melalui legislasi dan kebijakan berbasis gender. Keduanya, mengakui bahwa keberhasilan formal tidak selalu berarti keberhasilan substantif, karena masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial.

Namun terdapat juga perbedaan dari keduanya yang mana literatur ini lebih fokus menekankan pada evaluasi kebijakan dan pendekatan legislasi

dalam perspektif hukum tata negara dan administrasi publik, tanpa secara khusus membahas dalam sektor ketenagakerjaan atau representasi politik pada perempuan secara rinci. Sementara itu, penelitian berfokus pada membedah fenomena *glass ceiling* sebagai bentuk diskriminasi gender yang terwujud dalam ketimpangan karier, keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan publik, dan partisipasi politik, serta menjadikan CEDAW sebagai kerangka utama untuk menganalisis efektivitas kebijakan negara.

Lalu literatur **ketujuh** yang berjudul “*The Heterogeneous Impacts of the Ratification of CEDAW on the Adoption of Violence Againsts Women Laws*” yang ditulis oleh Byung Deuk Woo. Literatur ini membahas bagaimana ratifikasi Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi gender yaitu CEDAW dapat mempengaruhi adopsi hukum tentang kekerasan terhadap perempuan secara global, dengan fokus pada mekanisme difusi kebijakan dan heterogenitas dampaknya berdasarkan jenis kekerasan yang ditangani. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui *Pooled Event History Models* (PEHM) terhadap data panel 129 negara dari tahun 1908 hingga 2016 (Woo, 2021).

Literatur menunjukkan bahwa ratifikasi CEDAW secara signifikan meningkatkan kemungkinan negara-negara mengadopsi hukum yang secara spesifik mengkriminalisasi kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan oleh pasangan intim, serta pelecehan seksual. Namun, ratifikasi CEDAW mendorong negara-negara untuk menyesuaikan hukum mereka dengan standar internasional. Dalam proses ini, negara sering meniru kebijakan dari negara lain yang telah lebih dulu mengadopsi hukum seperti VAW, sehingga terjadi mekanisme difusi kebijakan. Dalam literatur ini juga menyoroti bagaimana CEDAW memberikan kerangka kerja gender spesifik yang mendorong transformasi sosial dan legislasi untuk menghapus segala bentuk diskriminasi gender (Woo, 2021).

Dalam konteks penelitian mengenai *glass ceiling* dan ketimpangan gender di Korea Selatan, literatur ini dapat memperluas cakupan dengan

menambahkan pespektif hukum internasional sebagai variabel penting dalam perubahan kebijakan domestik mengenai ketimpangan gender. Oleh karena itu, terdapat persamaannya dengan penelitian yaitu keduanya sama-sama menyoroiti dampak sistemik dari ketimpangan gender terhadap perempuan, serta menyarankan bahwa transformasi struktural dan budaya diperlukan untuk mencapai kesetaraan. Selain itu, keduanya menekankan pentingnya pengaruh norma dan tekanan eksternal, baik dari masyarakat maupun komunitas interansional dalam mendorong perubahan.

Terdapat perbedaan antara literatur dengan penelitian yang terlihat dalam literatur, secara spesifik menganalisis efektivitas CEDAW sebagai kerangka hukum internasional yang mampu mendorong perubahan legislasi diberbagai negara, termasuk Korea Selatan. Namun dalam penelitian, lebih memfokuskan pada budaya patriarki domestik dan warisan konfusianisme sebagai akar dari marginalisasi perempuan, khususnya dalam konteks ketenagakerjaan dan hambatan struktural seperti *glass ceiling*. Jika literatur ini lebih memfokuskan pada aspek legal-formal dan kebijakan.

Literatur kedelapan yang berjudul “*Feminist Legal Theory and Stone’s Panes of the Glass Ceiling*” ditulis oleh Rona Kaufman. Literatur ini merupakan respons dan analisis terhadap karya Kerri Lynn Stone yang mengkaji berbagai "keyakinan tidak diucapkan" (*unspoken beliefs*) yang memperkuat *glass ceiling*, yakni hambatan tak terlihat yang menghalangi perempuan mencapai posisi puncak dalam dunia kerja. Kaufman menempatkan karya tersebut dalam konteks teori feminis, khususnya feminisme liberal, serta perkembangan hukum antisipasi diskriminasi berbasis gender di Amerika Serikat (Kaufman, 2023).

Literatur ini menjelaskan bahwa meskipun kebijakan hukum seperti *Equal Pay Act* dan *Title VII Civil Rights Act* telah lama diberlakukan untuk melarang diskriminasi berbasis gender, ketimpangan masih terjadi karena adanya struktur sosial dan budaya maskulin yang tertanam dalam sistem hukum dan dunia kerja. Pendekatan feminisme liberal yang dianut dalam

literatur ini mengedepankan prinsip kesetaraan formal dan kesetaraan kesempatan, di mana perempuan harus memperoleh akses yang sama terhadap pekerjaan dan promosi tanpa diskriminasi eksplisit. Kaufman menegaskan bahwa feminisme liberal percaya pada perubahan melalui sistem hukum yang ada—misalnya dengan melarang diskriminasi langsung melalui undang-undang. Namun, ia juga mengkritik keterbatasan pendekatan ini karena tidak mampu mengatasi bentuk-bentuk diskriminasi struktural dan budaya yang lebih halus namun sistemik, seperti stereotip gender, penilaian performa berbasis bias, dan asumsi tentang tanggung jawab rumah tangga perempuan (Kaufman, 2023).

Dalam konteks penelitian mengenai glass ceiling di Korea Selatan, literatur ini sangat relevan karena menyajikan kerangka teoritis feminisme liberal yang menyoroti pentingnya reformasi kebijakan dan hukum untuk membongkar diskriminasi berbasis gender. Literatur ini juga menyelaraskan pendekatannya dengan tujuan CEDAW, yaitu mendorong kesetaraan substantif melalui instrumen hukum, yang menjadi fokus dalam penelitian.

Persamaan antara literatur ini dan penelitian terletak pada pendekatan normatif untuk menjelaskan dan mengatasi ketimpangan gender di tempat kerja. Keduanya mengakui bahwa sistem hukum dapat dan harus digunakan untuk menciptakan kesetaraan gender. Selain itu, keduanya menyoroti pentingnya mengungkap faktor-faktor budaya yang menyulitkan perempuan untuk mencapai posisi kepemimpinan. Perbedaannya adalah, literatur ini berfokus pada konteks hukum dan budaya di Amerika Serikat serta pendekatan liberal terhadap feminisme, sementara penelitian Anda lebih menekankan pada interaksi antara struktur budaya patriarki Korea Selatan dan norma internasional (CEDAW). Selain itu, Kaufman menyajikan *glass ceiling* dalam bentuk sembilan lapisan “keyakinan sosial” yang memperkuat diskriminasi, sedangkan penelitian menekankan pada pengaruh nilai-nilai konfusianisme dan domestikasi peran perempuan.

Literatur **kesembilan** berjudul “*Gender Equality Norms in International Governance: Actors, Contexts, Meaning*” ditulis oleh Susanne Zwingel. Literatur ini membahas bagaimana norma-norma kesetaraan gender berkembang dalam konteks tata kelola global, dengan fokus pada dinamika aktor, konteks historis, dan makna normatif dari waktu ke waktu. Literatur ini juga menekankan bahwa norma kesetaraan gender tidak hanya dibentuk di tingkat internasional, tetapi juga teruss berubah dan diterjemahkan ke dalam konteks domestik melalui proses *norm translation*. Norma-norma gender juga diforum global yang digambarkan seperti pada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mengalami proses pelembagaan, negosiasi, dan terkadang mengalami pelunturan. Kajian ini mengidentifikasi tiga fase penting dalam perkembangan norma gender global sejak 1945 yaitu fase pembentukan kesadaran, fase transformasi global, dan fase konsolidasi sekaligus pelunturan. Oleh karena itu ditunjukkan bahwa meskipun norma internasional seperti CEDAW menjadi dasar hukum internasional yang kuat, namun implementasinya sangat dipengaruhi oleh dinamika politik global, resistensi ideologis, dan keterbatasan institusional di level negara (Zwingel, 2019).

Literatur ini menyoroti adanya peran aktor internasional, negara, dan masyarakat sipil dalam membentuk dan menyebarkan norma kesetaraan gender, termasuk bagaimana norma-norma tersebut dapat diterima, ditolak, ataupun diterjemahkan secara selektif dalam konteks budaya dan institusional yang berbeda seperti di Korea Selatan. Oleh karena itu, literatur ini menekankan pentingnya *agency* dalam proses *norm translation* juga memperkuat pendekatan penelitian yang tidak hanya melihat eksistensi norma internasional, tetapi juga bagaimana norma tersebut diimplementasikan secara kontekstual.

Persamaan keduanya terletak pada pola interaksi antara norma internasional dan praktik domestik, serta bagaimana norma internasional dapat mempengaruhi kebijakan dan struktur sosial oleh suatu negara. Keduanya juga menggunakan pendekatan yang sama dengan mempertimbangkan faktor

resistensi budaya, politik, dan struktural terhadap norma kesetaraan gender. Terdapat juga perbedaan antara literatur dengan penelitian mengenai keduanya memiliki fokus yang berbeda. Di mana literatur bersifat konseptual dan makro, dengan cakupan yang luas terhadap perkembangan norma kesetaraan gender dalam forum internasional. Sementara itu, pada penelitian berfokus pada studi kasus yaitu Korea Selatan dengan mengevaluasi terhadap implementasi norma CEDAW dan tantangan struktural patriarki yang ada.

Literatur **kese puluh** dengan judul **“Ketidakadilan Gender Akibat Stereotip pada Sistem Patriarki”** ditulis oleh Gina Fahira Febriyanti dan Mulyadi Rahmatunnisa. Literatur ini membahas bagaimana stereotip berbasis gender yang dikonstruksi dalam sistem patriarki menghasilkan ketidakadilan gender yang sistemik dalam masyarakat. Literatur ini menunjukkan bahwa sistem patriarki tidak hanya berbentuk dominasi laki-laki secara struktural, tetapi juga dilegitimasi melalui stereotip dan norma sosial yang telah tertanam sejak kecil melalui proses sosialisasi gender (Febriyanti & Rahmatunnisa, 2022).

Salah satu kontribusi penting dari literatur ini adalah menjelaskan tentang bagaimana seksisme dan stereotip berperan sebagai mekanisme dalam melanggengkan budaya patriarki. Stereotip bahwa perempuan memiliki keemosionalan dan irasional, dijadikan sebagai dasar untuk pengecualian perempuan dari posisi kepemimpinan. Hal itu, menyebabkan rendahnya representasi perempuan dalam politik dan lembaga lainnya, serta menempatkan perempuan dalam posisi subordinat atau sebagai *second-class citizen*. Sehingga stereotip negatif pada literatur ini ditunjukkan sebagai persepsi kodrat alamiah pada perempuan, yang sesungguhnya merupakan dari hasil konstruksi sosial dan budaya patriarki (Febriyanti & Rahmatunnisa, 2022).

Persamaan keduanya adalah membahas akar ketidaksetaraan gender yang bersumber dari sistem patriarki yang tertanam dalam budaya dan struktur sosial. Literatur ini memperkuat adanya ketidakadilan gender yang terjadi secara tidak kebetulan, tetapi merupakan bagian dari sistem yang disengaja

yang direproduksi melalui norma, wacana, dan praktik sosial sejak dini. Terdapat perbedaan dikeduanya yaitu, pada literatur yang bersifat analitis-deskriptif dengan menekankan pada peran stereotip dalam menormalisasikan ketimpangan gender secara umum di masyarakat. Sementara itu, penelitian secara spesifik mengevaluasi bagaimana norma-norma internasional seperti CEDAW diterapkan dalam konteks struktural dan budaya di Korea Selatan.

Pada bab ini, peneliti telah mengulas berbagai literatur terdahulu, baik yang bersifat empiris maupun teoritis terkait penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Analisis terhadap literatur-literatur tersebut menunjukkan bahwa fenomena *glass ceiling* tidak hanya dipengaruhi oleh hambatan institusional, tetapi juga sangat berkaitan erat dengan budaya patriarki yang mengakar dan struktur sosial yang membatasi akses perempuan terhadap posisi strategi, baik dalam sektor ketenagakerjaan maupun sektor politik. Pada penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa meskipun Korea Selatan telah meratifikasi CEDAW dan mengadopsi berbagai kebijakan kesetaraan gender. Namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai ketimpangan antara norma hukum internasional dengan realitas sosial domestik yang berlangsung. Melalui tinjauan pustaka ini, menemukan bahwa untuk mengatasi fenomena *glass ceiling* secara efektif diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berlapis dengan mencakup penguatan kebijakan nasional, perubahan budaya kerja, serta pemberdayaan aktor-aktor lokal termasuk *social society*. Selain itu, relevansi teori feminisme liberal, norma internasional, dan konsep patriarki dalam menjelaskan ketimpangan gender yang terjadi di Korea Selatan memberikan dasar teoritis dalam menganalisis bagaimana implementasi CEDAW masih menghadapi berbagai tantangan struktural, kultural, dan sosial. Oleh karena itu, dari berbagai literatur pada bab ini, diharapkan dapat memberikan landasan yang kuat dalam memahami konteks penelitian yang akan dilakukan peneliti.